DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Banjarmasin, FH. Unlam Press, 2008.

Abdul Wahab, *Hukum dan Perikatan,* Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1999.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* PT Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Predanamedia, Jakarta, 2016.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan,* Rangkang Education & Pu-KAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Az. Nasution, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar,* Diadit Media, Jakarta, 2004.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Didik M. Arif Masur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen,* Jakarta, Gramedia, 2003.

Harkristuti Harkrisnowo, "*Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia"*.(Jakarta: Lokakarya Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan konsumen, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan 1996), hlm. 6

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2000.

I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT FIKAHATI ANESKA, Jakarta, 2010

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.

Muhammad Yunus, *Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru Yang Memihak Kaum Miskin*, (Terjemahan Alex Tri Kantjono), Gramedia, Jakarta, 2011.

Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana,* Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 1991.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Retno Tranggono, *Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1994.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui pendekatan Restoratif Suatu terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, P.T. Grasindo, Jakarta, 2000.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminoli Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

Sri Redzeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet. II, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Sriwidodo, *Cermin Dunia Kedokteran No. 41 (Kegunaan Kosmetik Untuk Kesehatan Kulit)*, PT. Kalbe Farma, Jakarta, 1986.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depertemen.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat kesehatan, kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.42.1018 tentang bahan kosmetik

Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK 03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis bahan Kosmetika.

Keputusan badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

C. Sumber lain

http://www.pom.go.id BPOM, "laporan Tahunan BPOM tahun 2013" , diakses pada tanggal 5 Februari 2017 pukul 20.12 WIB.

http://www.pom.go.id "*Dampak Penggunaan Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya*", diakses pada tanggal 16 Februari pukul 09.36 WIB.

http://indoprogress.blogspot.com, Ansorulloh Najmuddin, *Dilema Perundang-undangan di Indonesia*, diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 18:36 WIB.